



## **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun**

### ***Implementation Of Village Fund Allocation Policy In Pokan Baru Village Kecamatan Hutabayu Raja Simalungun Regency***

**Reza Rejeki, Indra Muda & beby Masitho Batubara\***

Fakultas Ilmu dan Sosial Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pengelolaan Dana Desa juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam implementasinya Sumber Daya Manusia dari aparatur masih kurang baik dari segi ketrampilan, keahlian dan pendidikan sehingga Aparatur Pemerintah Desa merasa kesulitan dengan pengelolaan Dana Desa. Penyerapan Dana Desa yang rendah oleh Pemerintah Desa, Aparat Pemerintah Desa yang merangkap jabatan di birokrasi Pemerintah Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan alokasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu. Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun kurang baik. Kualitas sumberdaya manusia dari pegawai kantor kepala desa yang masih kurang baik dari segi pendidikan dan menguasai teknologi yang masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi alokasi dana desa tidak optimal serta sumberdaya manusia dari masyarakat desa pokan baru yang masih kurang partisipasinya menyebabkan kurangnya tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan menjadi lambat. Disposisi pegawai kantor kepala desa pokan baru untuk bekerjasama masih kurang baik menyebabkan pelaksanaan implementasi menjadi lambat.

**Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan; Alokasi Dana Desa.

#### **Abstract**

*Village Fund Allocation is a fund allocated by the Regency / City Government for the Village sourced from the central and regional financial balance funds received by the Regency / City. Village Fund Management is also not balanced by adequate resources so that the implementation of Human Resources from the apparatus is still not good in terms of skills, expertise and education so that the Village Government Apparatus find it difficult to manage the Village Fund, Low Village Fund Absorption by the Village Government, Village Government Officials who hold concurrent positions in the Village Government bureaucracy. The purpose of this research is to find out the process and factors that hamper the implementation of village fund allocation policies. The implementation of the village fund allocation policy in Pokan Baru Village, Hutabayu Raja District, Simalungun Regency is not good. The quality of human resources from the village head office staff who are still inferior in terms of education and mastering technology is still low so that the implementation of the village fund allocation is not optimal and the human resources of the new pokan village community which is still lacking causes the lack of manpower to carry out the development slow . Disposition of new pokan village head office employees to collaborate is still not good, causing implementation to be slow.*

**Keywords:** *Implementation of Village; Fund Allocation Policy.*

**How to Cite:** Rejeki, R., Muda, I., & Batubara, B.M. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2) 2021: 151-155,



## **PENDAHULUAN**

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Terkait dengan kedudukan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga, harus mengikut sertakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Implementasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun masih terdapat beberapa masalah. Penyaluran Dana Desa belum sesuai dengan peraturan yang terdapat di UU No 113 Tahun 2014. Dana Desa yang berjumlah besar diterima Pemerintahan Desa, tidak adanya transparansi anggaran yang penting untuk diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengakses dan mengetahui Dana Desa yang diterima. Selain itu pengelolaan Dana Desa juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam implementasinya Sumber Daya Manusia dari aparatur masih kurang baik dari segi ketrampilan, keahlian dan pendidikan sehingga Aparatur Pemerintah Desa merasa kesulitan dengan pengelolaan Dana Desa. Penyerapan Dana Desa yang rendah oleh Pemerintah Desa, Aparat Pemerintah Desa yang merangkap jabatan di birokrasi Pemerintah Desa.

Adapun tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun, Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Kabupaten Simalungun.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu. Agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa

Pokanbaru Kecamatan Hutabatu Kabupaten Simalungun (Sinulingga, et.al., 2018; Kurniaty, 2020).

Lokasi penelitian merupakan tempat atau suatu wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kantor Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabatu Raja Kabupaten Simalungun.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007) *Transferability* adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007) Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007) Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabatu Raja Kabupaten Simalungun**

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabatu Raja Kabupaten Simalungun kurang baik. Kualitas sumberdaya manusia dari pegawai kantor kepala desa yang masih kurang baik dari segi pendidikan dan menguasai teknologi yang masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi alokasi dana desa tidak optimal serta sumberdaya manusia dari masyarakat desa pokan baru yang masih kurang partisipasinya menyebabkan kurangnya tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan menjadi lambat. Disposisi pegawai kantor kepala desa pokan baru untuk bekerjasama masih kurang baik menyebabkan pelaksanaan implementasi menjadi lambat.

Berdasarkan tujuan umum dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa, membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa, mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan menekatkan pada subjek pembangunan di pedesaan. Sementara tujuan khusus dari Dana Desa adalah keadilan dalam pembangunan infrastruktur tanpa membeda-bedakan, mengutamakan aspirasi masyarakat dan mendahulukan kepentingan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat Desa Pokan Baru (Lubis, 2012; Efridawati & Lubis, 2015).

Dana Desa diprioritaskan untuk daerah yang infrastrukturnya masih kurang baik dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat merasakan kemudahan dalam mencari pendapatan serta meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga mereka tidak mengalami kesusahan untuk mencari pendapatan dan meningkatkan pendidikan.

No	Uraian	Unit
1	TK	1
2	SD/Sederajat	4
3	SMP/Sederajat	1
4	SMA/Sederajat	-
5	Perguruan Tinggi	-

NO	Agama	Persentase	Jumlah
1	Islam	5%	112 Orang
2	Kristen / Katolik	95%	2.123 Orang
3	Hindu	-	
4	Budha	-	
5	Aliran Kepercayaan	-	
	Jumlah	100%	

### Faktor Penghambat

Faktor Penghambat penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun yaitu Kurangnya kualitas sumber daya manusia pegawai kantor kepala desa pokan baru kecamatan hutabayu raja kabupaten simalungun dari segi kualitas pendidikan yang sebagian pendidikannya masih rendah sehingga pengetahuannya tentang pelaksanaan implementasi alokasi dana desa masih rendah dan kurangnya menguasai bidang teknologi, Kurangnya partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dalam menyelesaikan pembangunan di desa pokan baru menyebabkan proses pembangunan terhambat dikarenakan kurangnya tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan, Masih ada sebagian pegawai kantor kepala desa pokan baru yang kurangnya kemauan, kesungguhan, keinginan untuk bekerjasama melaksanakan implementasi alokasi dana desa sehingga terhambat.

### SIMPULAN

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun kurang baik. Kualitas sumberdaya manusia dari pegawai kantor kepala desa yang masih kurang baik dari segi pendidikan dan menguasai teknologi yang masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi alokasi dana desa tidak optimal serta sumberdaya manusia dari masyarakat desa pokan baru yang masih kurang partisipasinya menyebabkan kurangnya tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan menjadi lambat. Disposisi pegawai kantor kepala desa pokan baru untuk bekerjasama masih kurang baik menyebabkan pelaksanaan implementasi menjadi lambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2008). *Simulasi dan Permodelan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Madha
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Efridawati & Lubis, A.A. (2015). Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 3 (1): 58-70.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Heri, R., Nasution, M., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190-203. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.59>
- Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (1): 14-24.
- Kurniaty, E. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 227-234. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.280>
- Lubis, E.S., (2012), Implementasi Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1 (1): 108-141
- Muda, I. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Medan
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ridha, M. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpicus
- Sidik, M. (2002). *Dana alokasi umum: Konsep, hambatan dan prospek di era otonomi daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Silalahi, R, Thamrin, & Matondang, A. (2019). Pengaruh Tingkat Persepsi Masyarakat Kecamatan Dolok Silau Realisasi Rencana Pemekaran di Kabupaten Simalungun. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 39-44.
- Simanjuntak, D.P. dan Eva S., (2016). Peranan Museum Simalungun sebagai Media Pewarisan Nilai Budaya, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 2 (2) (2016): 151-165.
- Sinulingga, L.O. Nasution, M.H.T. & Batubara, B.M. (2018). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 19-23
- Suharyanto, A., Armansyah M., dan Syafruddin R., (2017). Persepsi Masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai Usulan Pemekaran Kabupaten Simalungun, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2): 177-185
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2011). *Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Wahab, S.A., (2016). *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Wiflihani. (2015). *Gonrang dan Gual dalam Dinamika Masyarakat Simalungun*, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7 (2) (2015): 132-137

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah republik indonesia no 72 tahun 2005 pasal 68 ayat (1) h.29

Peraturan Pemerintah republik indonesia no 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Internet :

<http://pmd.kemendagri.go.id>

[www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabimkonkeudes.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabimkonkeudes.pdf)

<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/59032/5/BAB%20IV%20Gambaran%20Umum%20Lokasi%20Penelitian>

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/diversita>